



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Diterbitkan oleh :
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang
Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dapat tersusun secara tuntas sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 relatif tercapai, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Bahwa dari 14 indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam SK Bupati No. 188.45/326/427.12/2019, terdapat :
 - a. 2 indikator tercapai maksimal ($\geq 100\%$),
 - b. 10 indikator tidak tercapai secara maksimal (rentang capaian antara 79,66 % - 99,68 %);
 - c. 1 indikator tidak terhitung nilainya (indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan) karena bergesernya fungsi kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019.
 - d. 1 indikator belum dapat diukur capain kinerjanya dikarenakan nilai realisasi pada tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU secara garis besar sebagai berikut :
 - a. Adanya wabah pandemi covid-19 yang membawa dampak pada keterbatasan sumber daya {waktu (pembatasan jam kerja) dan anggaran};
 - b. Minimnya koordinasi dan komunikasi serta penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) antara pihak penyelenggara dengan penerima pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah.

Adapun penjabaran atas capaian IKU lebih rinci tersaji dalam Bab III dokumen ini.

Penyusunan dokumen laporan kinerja ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun tetap kami nantikan demi perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan.

Demikian, semoga bermanfaat.

Lumajang, 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Dasar Hukum	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas kinerja dan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Setda, merupakan unsur staf pendukung Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya yang terbagi pada bagian-bagian yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020, didukung dengan pegawai sebanyak 90 orang PNS dan 140 orang TKK yang terbagi ke dalam 8 Bagian dan staf ahli sebagai berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2021

NO.	BAGIAN	STATUS KEPEGAWAIAN			GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		PNS	CPNS	TKK	S.Ahli	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	DI	DIII	S1	S2
1	Adm. Pemerintahan	5	-	6	-	-	2	2	1	-	-	5	1	-	3	2
2	Hukum	6	-	8	-	-	1	5	-	-	-	2	-	-	12	-
3	Adm. Kesejahteraan Rakyat	7	-	6	-	-	3	3	1	-	-	6	-	-	6	1
4	Adm. Perekonomian	5	-	3	-	-	2	3	-	-	-	3	-	-	4	1
5	Layanan Pengadaan Barang / Jasa	13	-	9	-	2	2	8	1	1	1	4	-	3	13	-
6	Organisasi	7	-	7	-	-	2	4	1	-	-	4	-	4	5	1
7	Rumah Tangga dan Protokol	15	-	47	-	-	8	6	1	1	3	29	1	4	22	2
8	Umum	25	-	54	-	6	13	6	-	6	10	40	-	1	21	1
9	Sekretariat	7	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	--	-	-
Jumlah		90	-	140	3	8	37	37	5	8	13	93	2	12	86	8



Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai pada Sekretariat Daerah dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 93 orang, S1 dengan jumlah 86 orang, SMP dengan jumlah 13 orang, DIII dengan jumlah 12 orang, S2 dan SD dengan jumlah 8 orang, dan DI dengan jumlah 1 orang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II dan golongan ruang III sebanyak 37 orang, golongan ruang I sebanyak 8 orang dan golongan ruang IV sebanyak 5 orang, dengan demikian Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Sekretariat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020. Adapun fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah antara lain :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.4. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/326/427.12/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

1.5. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019– 2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2019 – 2023 menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Nilai SAKIP.

2.1.2 SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.



Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum;
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang perekonomian;
4. Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
5. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar;
6. Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik;
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan;
9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat & Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
10. Meningkatkan kualitas Pelayanan Keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
11. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik terkait Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai LPPD
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum	Nilai IKM di bidang hukum
	3. Meningkatnya fasilitasi kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
	4. Peningkatan kepuasan masyarakat di bidang perekonomian	Indeks kepuasan masyarakat di bidang perekonomian
	5. Peningkatan	Persentase OPD yang



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan Percentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu
	6. Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
	7. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan Indeks kepuasan masyarakat di bidang keprotokolan
	8. Meningkatnya kualitas pelayanan dinas pejabat dan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan
	9. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan kepegawaian di Lingkungan Setda	Nilai IKM di bidang pelayanan kepegawaian di lingkungan setda Nilai IKM di bidang pelayanan keuangan di lingkungan setda
	10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik terkait layanan pengadaan barang/jasa	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengadaan barang/jasa
Meningkatnya nilai SAKIP	11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Percentase OPD yang difasilitasi penerapan implementasi SAKIP-nya



2.1.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta dengan instansi pemerintah vertikal lainnya;
2. Memastikan setiap produk hukum daerah patuh terhadap prosedur, sesuai dengan substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan fasilitasi bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat miskin;
4. Meningkatkan upaya penyelenggaraan penyuluhan hukum dan produk hukum daerah;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan pihak terkait;
6. Optimalisasi pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya alam, data perekonomian, penanaman modal dan investasi;
7. Pengelolaan data administrasi pembangunan dari OPD sesuai dengan ketentuan;
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah;
10. Meningkatkan publikasi tentang hasil pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas keprotokolan dalam pelayanan kedinasan kepada Bupati/Wakil Bupati;
12. Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan dan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PPTK dan pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
14. Meningkatkan pembinaan secara berkala terhadap PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
15. Mengoptimalkan penerapan SAKIP oleh seluruh OPD melalui keberadaan dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi internal.



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah, sebagaimana pada **Lampiran II**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Penyusunan indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2021, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/326/427.12/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yakni terdapat 11 sasaran dengan jumlah total 14 indikator. Bahwa sembilan (9) dari sebelas (11) IKU Setda adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana penilaian atas IKM didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 yang dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait. IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan berbasis anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, dapat dilihat Capaian IKU Setda tahun 2021 pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Capaian IKU Setda tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai laporan penyenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	3,09	NA	NA
2.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang hukum	90	87,90	97,6%
3.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang perekonomian	88	87,47	99,39%
4.	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	100%	98,68	98,06%
5.	Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	96%	76,47%	79,66%
6.	Persentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu	90%	81,05%	90,06%
7.	Indeks kepuasan masyarakat	88	85,24	96,86%
8.	Persentase OPD yang difasilitasi penerapan/implementasi SAKIP-nya	100%	100%	100%
9.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan	88	-	-
10.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang keprotokolan	88	85,73	97,42%
11.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan	87	87,42	100,48%
12.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan keuangan	88	87,48	99,41%
13.	Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan kepegawaian	88	87,48	99,41%
14.	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengadaan barang/jasa	88	87,72	99,68%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2021, dapat dilihat bahwa terdapat 2 indikator yang tercapai maksimal, 10 indikator tidak tercapai secara maksimal, 1 indikator tidak dapat dihitung karena nilai LPPD belum dikeluarkan dari Kemendagri, dan 1 indikator tidak terhitung karena bergesernya fungsi kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun rincian indikator tersebut dapat dilihat pada sub bab 3.2 evaluasi dan analisis capaian kinerja.



3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3,09	NA	NA
Rata-rata Capaian			-	

Nilai LPPD dimaksud belum dapat diukur capain kinerjanya dikarenakan nilai realisasi pada tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi berupa nilai LPPD yang tidak dirilis selama 2 tahun oleh Kemendagri sehingga indikator nilai LPPD kabupaten dirasa tidak dapat dijadikan indikator sasaran dikarenakan rilisnya tidak tepat waktu sehingga mengganggu perhitungan capaian kinerja;

Upaya untuk mengatasi kendala/hambatan yakni :

Mengganti sasaran dengan indikator yang mudah diukur dan bisa dirilis setiap tahunnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan pada saat perubahan RPJMD agar capaian kinerja bisa terukur. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan dirasa sangat pas untuk dijadikan indikator sasaran karena dapat mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan pada bagian tata pemerintahan, yaitu administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah.

Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran Rp. 58.454.735.786,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.936.356.195	34.069.256.987	97,52
Jumlah	58.454.735.786	56.248.239.234	96,23



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat di bidang hukum	Nilai	90	87,90	97,6%
Rata-rata Capaian				97,6%

Pada tahun 2021 realisasi nilai IKM di bidang hukum sebesar 97,6%, nilai tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya kendala :

1. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur pembentukan produk hukum daerah;
2. Kurangnya ketiaatan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yakni :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. Membuat surat edaran terkait produk hukum daerah kepada OPD.

Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.454.735.786 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.936.356.195	34.069.256.987	97,52
Jumlah	58.454.735.786	56.248.239.234	96,23

Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang perekonomian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat di bidang perekonomian	Nilai	88	87,47	99,39%
Rata-rata Capaian				99,39%



Pada tahun 2021 realisasi nilai IKM di bidang perekonomian sebesar 99,39%, nilai tersebut tidak mencapai target, dikarenakan adanya kendala/hambatan seperti masih lambat/rendahnya iklim investasi, realisasi investasi dan penanaman modal di Kabupaten Lumajang.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut dengan mengoptimalkan pelayanan informasi di bidang energi dan sumber daya alam, data perekonomian, penanaman modal dan investasi.

Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.432.045.346 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Perekonomian dan Pembangunan	14.913.665.755	5.860.489.600	39,3
Jumlah	38.432.045.346	28.039.471.847	72,96

Permasalahan Penyelenggaraan Program Kegiatan dikarenakan adanya kebijakan refocussing anggaran sehingga beberapa kegiatan ada yang tidak bisa dilaksanakan.

Sasaran 4 : Meningkatnya fasilitasi kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	%	100%	98,68	98,06
Rata-rata Capaian				98,06

Pada tahun 2021 realisasi persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebesar 98,06%.

Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian indikator tersebut karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan rapat koordinasi dengan lembaga terkait.



Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp 58.454.735.786 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.936.356.195	34.069.256.987	97,52
Jumlah	58.454.735.786	56.248.239.234	96,23

Sasaran 5 : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	96%	76.47%	79,66%
2. Persentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu	%	90%	81,05%	90,06%
Rata-rata Capaian				84,86%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kurang maksimal yaitu dengan capaian total 84,86%. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator dan target diatas adalah :

1. Masih ada OPD yang tidak melaporkan laporan pembangunannya kepada BPBJ, hal ini bisa disebabkan oleh OPD tersebut lalai karena tidak ada sanksi yang diberikan apabila OPD tersebut tidak melaporkan.
2. Masih ada OPD yang menginputkan RUPnya hanya pada paket yang akan realisasikan melalui sistem, sedangkan yang pengadaan swakelola masih ada yang tidak diinputkan. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada OPD apabila tidak menginputkan RUPnya

Untuk mengatasi kendala/hambatan yang perlu dilakukan adalah :

1. BPBJ sudah melayangkan surat edaran kepada semua OPD untuk melaporkan laporan pembangunannya rutin perbulan serta melakukan sosialisasi kepada semua OPD;



2. BPJ melakukna desk rutin tribulanan sebagai upaya pendampingan, memonitoring dan mengevaluasi proses penginputan pada OPD.

Sebelum ada kebijakan perampingan struktur, indikator kinerja tersebut diampu oleh Bag. Pembangunan, namun dengan adanya perampingan struktur sehingga tugas dan fungsi pembangunan melebur menjadi satu kedalam Tusi Bag. LPBJ sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019. Sehingga dari dasar tersebut, maka pencapaian indikator tersebut didukung oleh 1 program teknis dan 1 program rutin, yakni program perekonomian dan pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.432.045.346 dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Perekonomian dan Pembangunan	14.913.665.755	5.860.489.600	39,3
Jumlah	38.432.045.346	28.039.471.847	72.96

Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	88	85,24	96,86%
Rata-rata Capaian				96,86%

Pada tahun 2021 indikator nilai IKM tidak mencapai target, yaitu dengan capaian sebesar 96,86%, adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator dan target di atas adalah :

1. Adanya kebutuhan tambahan diluar kebutuhan saat koordinasi;
2. Perencanaan anggaran yang kurang tepat karena bagian umum melayani permintaan pimpinan yang berbeda setiap tahunnya;
3. Kurangnya komunikasi antara pemohon dengan Bagian Umum terkait kebutuhan acara.

Untuk mengatasi kendala/hambatan, yang perlu dilakukan adalah :

1. Menyerahkan contact person penanggung jawab acara untuk memudahkan koordinasi terkait kebutuhan acara dengan Bagian Umum;



2. Lebih meningkatkan komunikasi dengan pimpinan terkait dengan permintaan layanan.
3. Panitia diminta merinci kebutuhan acara dan menyerahkan rundown acara sehingga Bagian Umum dapat memfasilitasi kebutuhan dengan tepat;

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 2 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.368.401.541, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.936.356.195	34.069.256.987	97,52
Program Perekonomian dan Pembangunan	14.913.665.755	5.860.489.600	39,3
Jumlah	73.368.401.541	62.108.728.834	84,65

Sasaran 7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan/ implementasi SAKIP-nya	%	100	100	100%
Rata-rata Capaian				

Pada tahun 2021 realisasi atas indikator tersebut adalah 100%. Pencapaian atas indikator tersebut tidak terlepas dari kendala/hambatan antara lain :

1. Adanya penyesuaian atas pengimplementasian Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang memebawa dampak pada berubahnya jenjang/level perencanaan dan tidak sesuai dengan dokumen renstra yang telah disusun;
2. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang pentingnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD-Renstra-Renja-RKA-PK);
3. Belum seluruhnya perbaikan atas laporan hasil evaluasi AKIP OPD ditindaklanjuti.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada OPD, pembinaan dilaksanakan melalui surat kedinisan dan rapat/sosialisasi penyusunan perjanjian kinerja (PK) agar OPD lebih memperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk lebih diselaraskan;



2. Melakukan monitoring terhadap dokumen implementasi SAKIP OPD, secara berkala mendorong OPD untuk melakukan penyusunan pelaporan kinerja tribulan melalui surat kedinasan.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab./Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 23.528.379.591,- dan realisasi dari pagu tersebut sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Jumlah	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30

Sasaran 8 : Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan	Nilai	88	-	-
2. Indeks kepuasan masyarakat di bidang keprotokolan	Nilai	88	85,73	97,42%
Rata-rata Capaian				97,42%

Pada tahun 2021 indikator atas target kinerja indeks kepuasan masyarakat di bidang keprotokolan sebesar 97,42%. Sedangkan untuk indeks kepuasan masyarakat di bidang kehumasan tidak dapat ditunjukkan dikarenakan fungsi kehumasan bergeser ke Dinas Komunikasi dan Informatika sejak Januari 2020 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2020.

Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya :

3. Kurangnya koordinasi dari penyelenggara acara yang melibatkan pimpinan;
4. Surat yang masuk belum memenuhi standar tata naskah dinas.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara acara yang melibatkan pimpinan daerah;
2. Langsung mengarahkan pihak yang mengajukan surat agar membenahi surat yang tidak sesuai ketentuan.



Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.528.379.591, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Jumlah	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30

Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pelayanan dinas pejabat dan rumah tangga kepala daerah / wakil kepala daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan	Nilai	87	87,42	100,48%
Rata-rata Capaian			100,48%	

Pada tahun 2021 indikator nilai IKM telah mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar 100,48%, adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator dan target di atas adalah :

- Kurangnya sumberdaya manusia Sub. Bagian Rumah Tangga.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seringkali bersinggungan dengan tugas dan fungsi pada Bagian Umum, terutama dalam pelayanan tamu pimpinan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

Senantiasa mengedapankan standar dan maklumat pelayanan yang didukung dengan komitmen terhadap pemenuhan pakta integritas, sehingga fasilitasi pendampingan kegiatan protokoler pimpinan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan baik.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.528.379.591, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Jumlah	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30



Sasaran 10 : Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan keuangan	Nilai	88	87,48	99,41%
2. Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan kepegawaian	Nilai	88	87,48	99,41%
Rata-rata Capaian				99,41%

Pada tahun 2021 indikator nilai IKM realisasi sebesar 99,41%, adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator dan target diatas adalah :

1. Adanya penambahan dan pengurangan pegawai di lingkungan Setda yang tidak terinformasikan oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. Adanya mutasi dan kematian pegawai yang tidak terinformasikan oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Adanya perubahan anggaran akibat covid-19.

Untuk mengatasi kendala/hambatan, yang perlu dilakukan adalah :

1. Permintaan keterangan data pegawai secara reguler;
2. Permintaan pemberitahuan perubahan data kepegawaian secepatnya;
3. Mengelola anggaran yang ada untuk mencukupi kebutuhan kegiatan OPD.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.528.379.591, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Jumlah	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30



Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik terkait layanan pengadaan barang/jasa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengadaan barang/jasa	Nilai	88	87,72	99,68
Rata-rata Capaian				99,68

Pada tahun 2021 indikator nilai IKM pada pelayanan pengadaan barang/jasa belum mencapai target, yaitu dengan capaian sebesar 99,68 %.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator dan target di atas dikarenakan pandemi Covid 19 masih menjadi hambatan utama karena masih ada pembatasan untuk melakukan kegiatan bertatap muka secara langsung, sehingga pelayanan terhadap pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya optimal.

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelayanan melalui daring lebih ditingkatkan sehingga diharapkan bisa mencapai target yang diinginkan.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis dan 1 program rutin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.432.045.346 dan realisasi sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.528.379.591	22.178.982.247	94,30
Program Perekonomian dan Pembangunan	14.913.665.755	5.860.489.600	39,3
Jumlah	38.432.045.346	28.039.471.847	72.96



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada BAB III, dapat dikatakan relatif tercapai, meskipun dalam hal ini angka realisasinya tidak seluruhnya berada pada angka 100%. Jika mencermati hasil evaluasi pelaksanaan di tahun 2021 ternyata masih terdapat beberapa kendala baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu adanya wabah pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun waktu. Namun demikian, dengan adanya keterbatasan tersebut tentunya tidak menjadi penghalang untuk terus berupaya dan berkomitmen serta berbenah dalam meningkatkan kinerja agar target yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat dan dampak yang positif kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH



LAMPIRAN I

RESNSTRA 2019-2023

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				fasilitasi penataan wilayah dan kerjasama	Persentase Desa terbina tentang regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa				198 Desa		198 Desa		198 Desa		198 Desa		198 Desa					
					Jumlah Desa dan/atau Kelurahan yang tersosialisasikan tentang Pemilu									205 Desa / Kelurahan		205 Desa / Kelurahan		205 Desa / Kelurahan				
					Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi,	*)	0	,	6 konflik	1,120,000,000	6 konflik	590,000,000	6 konflik	590,000,000	6 konflik	590,000,000	24 konflik					
					Jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang dilelang sewa	*)			33 bidang		33 bidang		33 bidang		33 bidang		33 bidang					
					Persentase pejabat pembuat akta tanah yang mengikuti Bimtek Pertanahan dari yang belum pernah mengikuti	*)			100%		100%		100%		100%		100%					
					Jumlah MoU dan PKS yang dimonitoring pasca ditetapkan	*)			10 Mou dan PKS	10 Mou dan PKS		10 Mou dan PKS	10 Mou dan PKS		10 Mou dan PKS	10 Mou dan PKS		40 MoU dan PKS				
					Jumlah dokumen penetapan batas wilayah Kecamatan	*)			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			12 dokumen				
				Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	*)	100%	69 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan	Jumlah Lomba Keagamaan Antar Lembaaga Pendidikan Yang Mendapatkan Fasilitasi	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	224.975.000				
			Program Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.900.000.000	5.050.000.000			
			Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang terfasilitasi	9	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2.600.000.000	2.650.000.000			
				Jumlah jamaah haji yang terfasilitasi	1.200	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
				Jumlah peserta lomba keagamaan tingkat kabupaten yang terfasilitasi	0	0	0	1.000	0	0	1.050	0	0	0	0	0	0	1.100				
				Jumlah peserta lomba keagamaan tingkat provinsi yang terfasilitasi	0	0	0		800	800	0	850	850	850	850	850	850	850				
				Jumlah jamaah yang mengikuti pembinaan kehidupan beragama	0	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800				
			Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu	6.200	0	0	3.900	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.450.000.000	1.500.000.000		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Jumlah peserta khitan yang terfasilitasi	200	0	0	200		200		200		200		200					
					Jumlah peserta isbat nikah yang terfasilitasi	0	0	0	200		0		200		0		200					
				Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan lembaga keagamaan	40	0	0	50		50		60		60		70					
					Jumlah peserta hari santri yang terfasilitasi	0	0	0	2.000		3.000		3.500		4.000		4.500		900.000.000			
					Jumlah peserta lomba keagamaan antar lembaga pendidikan agama yang terfasilitasi	0	0	0	1.000		1.000		1.500		1.500		2.000					
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang hukum	Program pengembangan dan penyempurnaan produk hukum	Persentase Peningkatan Produk Hukum Yang Selaras Dengan Ketentuan Lebih Tinggi	85%	2%	605.000.000	2%	800.000.000	2%	880.000.000	2%	880.000.000	2%	945.000.000	97%	1.100.000.000				
				Legislati Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Raperda Yang Diajukan ke DPRD	0,81	82%	330.000.000	85%	425.000.000	87%	450.000.000	90%	475.000.000	92%	500.000.000	95%	600.000.000				
					Presentase Produk Hukum Yang Dietapkan	1	1	125.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Jumlah ASN yang mendapatkan Pelatihan Pembentukan Produk Hukum	60 orang		0	75 orang	75.000.000	75 orang	75.000.000	75 orang	75.000.000	100%	75.000.000	75 orang	75.000.000				
					Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Desa	Presentase Perdes yang diklarifikasi dan Raperdes yang Dievaluasi	1	1	85%	200.000.000	90%	210.000.000	95%	225.000.000	96%	250.000.000	97%	300.000.000,00	300.000.000,00			
					Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	625.000.000			
					Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan	12.500	2.500	2.500	265.000.000	2.500	280.000.000	2.500	290.000.000	2.500	300.000.000	2.500	325.000.000	325.000.000			
					Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Hukum Daerah Yang Terpublikasikan	40,00%	50%	55%	275.000.000	60%	285.000.000	65%	290.000.000	70%	300.000.000	75%	300.000.000	300.000.000			
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT	Presentase Peningkatan Kepastian Hukum Sengketa Hukum	100%	100%	100%	540.000.000	100%	575.000.000	100%	625.000.000	100%	655.000.000	100%	438.000.000				
					Bantuan Hukum Bagi Aparatur	Presentase Bantuan Kepada Aparatur	100,00%	100%	100%	200.000.000	100%	215.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100	350.000.000		
					Pembinaan Hukum Kepada calon PPNS		0,00%	0	75	75.000.000	75	75.000.000	75	75.000.000	75	75.000.000	75	80.000.000	75	85.000.000		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Presentase Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	0,00%	50%	165.000.000	60%	250.000.000	70%	250.000.000	75%	275.000.000	75%	275.000.000	80%	3.000.000.00				
		Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perekonomian	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Presentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100%	90.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	90.200.000				
				Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	26	16	75.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	75.200.000			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendistribusian Migas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	40	15	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15.000.000			
				Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Presentase kenaikan jumlah realisasi investasi	346%	15%	111.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%	111.250.000			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Bidang Penanaman Modal	0	2 laporan	31.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 laporan	31.700.000				
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam (ESDA)	Jumlah Objek yang difasilitasi dan dikoordinasikan	215 obyek	100 obyek	53.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 obyek	53.170.000				
				Kegiatan Penyusunan Data Ekonomi Daerah	Jumlah buku data perekonomian daerah Kab. Lumajang	50 buku	50 buku	16.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 buku	16.380.000				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Kegiatan Pembinaan BUMD	Jumlah pembinaan BUMD	0	12 Kali Rapat Koordinasi, 2 kali Rapat pemantapan BUMD	10.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Kali Rapat Koordinasi, 2 kali Rapat pemantapan BUMD	10.000.000				
			Program fasilitasi dan koordinasi perekonomian daerah	Tingkat Inflasi Daerah	3.17	0			4 ± 1		4 ± 1		4 ± 1		4 ± 1		332.426.498	303.938.454	185.748.910	185.748.910		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Perekonomian Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengendalian perekonomian daerah	26 pelaksanaan	0		0	19 pelaksanaan	20 pelaksanaan	21 pelaksanaan	21 pelaksanaan	22 pelaksanaan	22 pelaksanaan	22 pelaksanaan	16 pelaksanaan	24.980.026	24.980.026	44.835.944	76.861.618		
			Fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	40 pelaksanaan	0		0	14 pelaksanaan	14 pelaksanaan	15 pelaksanaan	15 pelaksanaan	16 pelaksanaan	16 pelaksanaan	16 pelaksanaan	22 pelaksanaan	44.835.944	42.466.451	76.861.618	305.281.222		
			Fasilitasi dan koordinasi Bidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang Penanaman Modal	40 pelaksanaan	0		0	19 pelaksanaan	20 pelaksanaan	21 pelaksanaan	21 pelaksanaan	22 pelaksanaan	22 pelaksanaan	22 pelaksanaan	22 pelaksanaan	69.766.312	279.119.454	76.861.618	305.281.222		
			Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Obyek yang difasilitasi dan dikordinasikan	215 obyek	0		0	111 obyek	115 obyek	121 obyek	121 obyek	128 obyek	128 obyek	128 obyek	128 obyek	100%	100%	100%	100%		
			Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai	Persentase perangkat daerah yang mengelola DBHCT sesuai dengan ketentuan	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	237.219.996	238.649.915	305.281.222	305.281.222		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Prosentase Perangkat Daerah yang menerima informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai	100%	100%		189,000,000	100%		100%		100%		100%		100%	305,281,222				
		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	Jumlah OPD / SKPD yang melaksanakan administrasi pembangunan (laporan realisasi prog / keg, laporan realisasi barang / jasa dan laporan pemetaan RUP)	52 OPD (70 SKPD)	52 OPD (70 SKPD)		224,877,500	52 OPD (70 SKPD)		259,700,000		290,000,000		290,000,000	52 OPD (70 SKPD)	1,354,577,500				
		Persentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu	Sosialisasi Tata Cara, Pedoman dan Petunjuk Teknis	Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi Aplikasi SMEP	52 OPD (70 SKPD)	52 OPD (70 SKPD)		26,199,000	52 OPD (70 SKPD)		40,000,000	52 OPD (70 SKPD)		60,000,000	52 OPD (70 SKPD)		60,000,000	52 OPD (70 SKPD)	216,190,000			
			Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan	52 OPD (70 SKPD)	52 OPD (70 SKPD)		135,237,500	52 OPD (70 SKPD)		157,400,000	52 OPD (70 SKPD)		160,000,000	52 OPD (70 SKPD)		160,000,000	52 OPD (70 SKPD)	772,637,500			
			Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	Jumlah OPD yang terfasilitasi	52 OPD (70 SKPD)	52 OPD (70 SKPD)		63,450,000	52 OPD (70 SKPD)		62,300,000	52 OPD (70 SKPD)		80,000,000	52 OPD (70 SKPD)		80,000,000	52 OPD (70 SKPD)	385,750,000			
		Meningkatnya kualitas Peayanan Publik terkait Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai aturan	- ")	100%	373,857,000	100%		383,070,000	100%	391,190,000	100%	398,820,000	100%	404,355,000	100%	412,970,000	56,590,000		
			Penyusunan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pedoman teknis pengadaan barang / jasa yang disusun	- ")	150		48,387,000	150		49,620,000	150		51,240,000	150	150	150	54,880,000	150			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Usulan Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terfasilitasi	150	155		160	165		170	175		180		231.070.000					
				Pembinaan dan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Pelaku Pengadaan yang terbina dan tersosialisasi	250	300		350	400		450	500		550		116.435.000	8.875.000	378.926.000			
				Penyusunan Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa	Tersusunnya Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa	- *)	8		8	8		8	8		8		7.115.000	170.000.000				
				Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Prosentase Pelayanan Pengadaan secara Elektronik	- *)	- *)	- *)	100%	100%		100%	100%		100%		0	0	0			
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Kehumasan	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase press release yang dikirimkan ke Diskominfo dan lembaga terkait (media massa)	95.12%	100%		0			0					0					
			Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Keprotokolan		Persentase wartawan yang menghadiri jumpa pers	67%	75%															
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah press release yang dibuat	635 press release	720 press release		0			0			0		0		0			
					Jumlah pelaksanaan jumpa pers	12 pelaksanaan	20 pelaksanaan		0			0			0		0		0			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan, pemberitaan, dan dokumentasi) bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	100%	1.091.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.644.000.000				
					Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan dan kerumah tanggaa n) bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	-	-	100%	3.350.000.000	100%	3.576.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	1.644.000.000	50.000.000			
				Pendokumentasi an Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah lembar pencetakan dokumentasi	2.300 lembar	2.825 lembar	39.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000			
				Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan keprotokol terhadap kegiatan kedinasan pimpinan daerah (dengan/tanpa koordinasi)	712 kegiatan	-	-	-	50.000.000	750 kegiatan	-	40.000.000	850 kegiatan	-	850 kegiatan	-	850 kegiatan	50.000.000	50.000.000		
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek keprotokol	-	-	-	185 orang peserta	-	-	-	250.000.000	-	270.000.000	-	270.000.000	900.000.000	900.000.000			
				Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta dialog/ audiensi	359 peserta	3.550 peserta	1.051.950.000	1.460 peserta	1.500 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	1.600 peserta	2.000 peserta	2.000 peserta			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang dikelola perjalanan dinas dalam daerahnya	2 pejabat	-	-	2 pejabat	200.000.000	2 pejabat	212.000.000	2 pejabat	224.700.000	2 pejabat	228.000.000	2 pejabat	228.000.000				
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah rumah tangga pejabat yang dikelola kebutuhannya	2 rumah tangga pejabat	-	-	2 rumah tangga pejabat	1.400.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.484.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.573.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.670.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.670.000.000				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat & Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kerumah tangga	Program peningkatan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah	-*)	85	2.801.760.000	86	0	87	0	88	0	89	0	89	0				
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah tamu Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dilayani kebutuhannya	-*)	85	343.500.000	86	Rp0	87	Rp0	88	###	89	Rp0	89	Rp0				
				Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat yang dikelola perjalanan dinas dalam daerahnya	-*)	-	146.250.000	-	Rp0	-	Rp0	-	###	-	Rp0	-	Rp0				
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah pejabat yang dikelola perjalanan dinas luar daerahnya	2 pejabat	-	-	2 pejabat	1.500.000.000	2 pejabat	1.590.000.000	2 pejabat	1.685.400.000	2 pejabat	1.786.000.000	2 pejabat	1.786.000.000				
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah rumah tangga pejabat yang dikelola kebutuhannya	2 rumah tangga pejabat	-	-	2 rumah tangga pejabat	1.400.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.484.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.573.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.670.000.000	2 rumah tangga pejabat	1.670.000.000				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat & Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kerumah tangga	Program peningkatan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah	-*)	85	2.801.760.000	86	0	87	0	88	0	89	0	89	0				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah tamu Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dilayani kebutuhannya	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.616.296.875	862.025.000	1.939.556.250		
				Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat yang dikelola perjalanan dinas dalam daerahnya	*)	-	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp434.109.375	Rp231.525.000	Rp520.931.250		
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Pejabat yang dikelola perjalanan dinas luar daerahnya	*)	-	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp413.437.500	Rp220.500.000	Rp496.125.000		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah rumah tangga pejabat yang di kelola kebutuhannya	*)	-	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp393.750.000	Rp210.000.000	Rp472.500.000		
				Program peningkatan pengelolaan keuangan dan pembinaan aparatur	Presentase peningkatan pengelolaan keuangan dan pembinaan aparatur				100%		100%		100%		100%		100%	980 dokumen pengesahan SPJ dan SPM	Rp75.920.491	Rp83.036.492		
				'Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM	Jumlah penerbitan dan pengesahan SPJ dan Dokumen SPM di Lingkup SETDA				950 dokumen pengesahan SPJ dan SPM	Rp64.523.839	960 dokumen pengesahan SPJ dan SPM	Rp70.352.777	970 dokumen pengesahan SPJ dan SPM	Rp199.062.198	100%	100%	100%	4875 dokumen				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan keuangan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan Realisasi Anggaran di lingkungan Setda	87	90	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan kepegawaian	Kegiatan Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM	Jumlah penerbitan pengesahan SPJ di lingkup Setda	900 dokumen pengesahan SPJ			92	95	98	100							344,153,599			
					Jumlah penerbitan dokumen SPM di lingkup Setda	900 dokumen SPM				64,523,839	64,523,839	70,352,777	70,352,777	970 dokumen pengesahan SPJ	970 dokumen pengesahan SPJ	980 dokumen SPM	980 dokumen SPM	100	100	4785 dokumen pengesahan SPJ		
					Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pengajuan usul pensiun ASN di lingkup Setda yang diproses tepat waktu	100	100		925 dokumen pengesahan SPJ	950 dokumen pengesahan SPJ	960 dokumen pengesahan SPJ	970 dokumen SPM	100	100	100	100	100	104	173,139,007		
					Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengusulan pensiun ASN di lingkup Setda yang diajukan ke BKD	40	21		104,922,000	104,922,000	104,922,250	104,922,250	146,692,250	146,692,250	0	0	0	0	0		
Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya	Reformasi Birokrasi	Nilai kenaikan indeks Reformasi Birokrasi	-*)	5			0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0		
				Tata Laksana	Jumlah OPD yang dibina pelayanan publiknya	35 OPD	35 OPD			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
					Jumlah OPD yang dibina TND-nya	52 OPD	52 OPD			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Kelembagaan	Jumlah OPD yang disosialisasikan untuk melakukan anjab, Evjab dan Beban Kerja	52 OPD	52 OPD	199,382,100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
					Jumlah OPD yang mengusulkan dilakukan perubahan kelembagaan	5 OPD	5 OPD		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
				Standarisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja OPD disusun sesuai ketentuan	52 OPD	52 OPD	240,526,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
					Jumlah OPD yang menyusun risalah budaya kerja	8 OPD / unit kerja	10 OPD / unit kerja		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
					Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala OPD yang disusun sesuai ketentuan dan selaras dengan dokumen perencanaan	52 PK OPD	52 PK OPD		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
				Program Fasilitasi, Koordinasi Penataan Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Tata Laksana	Persentase OPD yg difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana	-*)	-	0	100%	829,645,410	100%	765,000,000	100%	765,000,000	100%	765,000,000	100%	765,000,000				
				Tata Laksana	Jumlah OPD yang dibina pelayanannya	-*)	-	0	35 OPD	345,746,500	35 OPD	315,000,000	35 OPD	315,000,000	35 OPD	315,000,000	35 OPD	315,000,000	315,000,000			
					Jumlah OPD yang dibina TND-nya	-*)	-	0	52 OPD	219,320,310	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	200,000,000			
				Kelembagaan	Jumlah OPD yang disosialisasikan untuk melakukan anjab, Evjab dan Beban Kerja	-*)	-	0	52 OPD	219,320,310	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	52 OPD	200,000,000	200,000,000			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat yang dilakukan pemeliharaan sehingga dalam kondisi layak pakai	-")	85%		87%		90%		92%		95%		15,397,505,788	6,794,967,670		")		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara sehingga dalam kondisi layak pakai	-")	")		")		")		")		")		14,077,981,578	6,212,657,491	7,865,324,087	103,056,786		
				Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi yang	-")	")		")		")		")		")		13,044,556,957	5,757,045,283	7,288,51,694	103,056,786		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan (laporan keuangan dan laporan kinerja) yang disusun sesuai ketentuan	-")	100%		100%		100%		100%		100%		95,499,001	2,097,161	3,185,2246	2,475,253		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	-")	")		")		")		")		")		22,782,400	3,185,2246	375,948,03			
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	-")	")		")		")		")		")		292,131,92	343,730,31				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	-*)	**))		**))		**))		**))		**))		**))					
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu	-*)	**))		**))		**))		**))		**))		**))		100%			
								100%		100%		100%		100%		100%		100%				
									85%		87%		90%		92%		95%					
										9,424,047,801		9,424,047,801		11,964,693,570		13,045,556,957		15,397,505,788				
										41,563,500		3,154,384		58,110,244		13,175,833,335		15,551,269,349				
										2,460,000		3,439,344		3,439,344		3,439,344		4,059,415				

Keterangan :

*) = Tidak ada data dari Bagian tersebut

**) = target kinerja tidak dapat ditentukan, karena disesuaikan di tiap Bagian. Hal ini karena program-program yang bersifat rutin ada di tiap-tiap Bagian.

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, September 2021

PIHAK KEDUA

H. THORIQUL HAQ, M.ML

PIHAK PERTAMA

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	88
2	Meningkatnya tata kelola pemerintaan yang baik	Nilai LPPD	3.09
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang hukum	90
4	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	100%
		Presentase Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	100%
5	Peningkatan Kepuasan Masyarakat di bidang perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perekonomian	88
6	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	Presentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	96%
		Presentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu	90%
7	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	88
8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Kehumasan dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Kehumasan	88
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Keprotokolan	88
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Kerumahtanggaan	87
10	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	88
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Pelayanan Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah	88
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang difasilitasi penerapan / Implementasi Sakipnya	100%

NO.	PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp23,518,379,591	APBD (DAU)
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp34,936,356,195	APBD (DAU)
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp14,913,665,755	APBD (DAU)
	Total	Rp73,368,401,541	

Bupati Lumajang : H. THORIQUL HAQ, M.M.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Lumajang

Dalam rangka penyelesaian perjanjian kinerja perubahan anggaran tahun 2021

Bupati Lumajang : H. THORIQUL HAQ, M.M.

Jabatan : Sekretaris Daerah

Dalam rangka penyelesaian perjanjian kinerja perubahan anggaran tahun 2021

Lumajang, September 2021

Bupati : BUPATI LUMAJANG

Jabatan : Sekretaris Daerah

Tanda tangan :

H. THORIQUL HAQ, M.M.

SEKRETARIS DAERAH

Jabatan : Sekretaris Daerah

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004